

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN KHUSUS MURID MANDIRI PADA SMA/SMK DI KOTA PALU

Altar

www.taro_applejack@yahoo.com

(Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims: 1) at finding out and analyzing Staff's Performance Of Provincial Education Office Of Central Sulawesi In Providing Special Help Of Independent Students At Sma/Smk In Palu, and 2). At identifying what factors that restrict the Staff's Performance Of Provincial Education Office Of Central Sulawesi In Providing Special Help Of Independent Students At Sma/Smk In Palu. This is a qualitative research, interviews using purposive sampling, chosen by taking into consideration and specific purpose by the head of secondary education affairs (DIKMENTI), the head of senior high school guidance section, the head of vocational high school guidance section, the staff of secondary education affairs, and the principals of senior high and vocational high school. The writer used the theory (Dwiyanto, 1995:6) of Productivity, quality, responsiveness, responsibility and accountability. The techniques of data collection were observation, interview and documentation. It is found that firstly, the Productivity, showing the level of each staff's understanding in providing special aid to the independent students of SMA/SMK at the Provincial Education and instruction office of central sulawesi province, is effective enough; secondly, the quality of service is that there are staff, responsible for providing special aid to the independent students, who often ignore their job or do another job; thirdly, responsiveness shows that there are complaints from the schools relating to the distribution of special aid to the independent student at the Provincial Education and Instruction Office of Central Sulawesi Province, and less optimality of catering for the students' needs; and fourthly, responsibility is, looking at the ease in forwarding the case and assessing the documents proposed by the school that is going to receive special aid to the independent students, less maximal.

Keywords: *Staff's Performance, of Productivity, Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability*

Dunia pendidikan sedang mengalami berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat. Perubahan dan permasalahan tersebut menurut Mulyasa (2008:8), mencakup *social change, turbulence, complexity, and chaos*; seperti pasar bebas (*free trade*), tenaga kerja bebas (*free labour*) perkembangan masyarakat informasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka Bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada fenomena yang sangat

dramatis, yaitu rendahnya daya saing sebagai indikator bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. *Human Development Index* (HDI) melaporkan bahwa Indonesia berada pada ranking 108 tahun 1998, ranking 109 pada tahun 1999, dan ranking 111 tahun 2004, data pada tahun 2011 jauh lebih merosot di posisi 124 dari 187 negara yang diteliti. Rendahnya peringkat daya saing Indonesia di pasar global juga digambarkan pada permasalahan produktifitas sektor industri dan perdagangan. menurut Depdiknas (2001: 2)

Pembangunan Indonesia sedang berfokus pada otonomi, dengan menyerahkan sebagian wewenang pusat kepada daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Otonomi daerah pun, dalam melaksanakannya telah memunculkan berbagai isu sentral, seperti: besarnya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah, sehingga pelaku pembangunan lebih mengutamakan putra daerah yang terkadang mengabaikan kualitas, adanya tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan dengan otonomi daerah diharapkan terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah.

Pendidikan dalam konteks otonomi daerah diharapkan dapat mengambil peran dalam mewujudkan isu keempat, sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan nasional tersebut, dalam tatanan pendidikan mikro harus mampu menghasilkan SDM berkualitas dan profesional sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sisdiknas Pasal 3, termasuk didalamnya kebutuhan dunia kerja dan respons terhadap perubahan masyarakat setempat. Desentralisasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah harus mampu

meningkatkan mutu layanan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan lokal dan tantangan global. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu berpikir global (*Think globally*), dan mampu bertindak lokal (*act locally*), serta dilandasi oleh akhlak yang mulia (*akhlakul kharimah*).

Untuk mempersiapkan SDM pembangunan, pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada kebutuhan material yang pendek tetapi harus menyentuh dasar untuk memberikan watak pada visi dan misi pendidikan, yaitu perhatian mendalam pada etika moral dan spritual yang luhur. Dalam hal ini kualitas pendidikan di komponen pendidikan seperti peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi, kualitas dan pemerataan penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung oleh kebijakan (*political will*) pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, termasuk kepala sekolah sebagai manajer disekolah. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah memperoleh bantuan pendidikan untuk sekolah menengah atas, namun menurut hasil pengamatan penulis kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum maksimal, baik pada Sekolah Menengah Atas (SMU) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bertolak dari uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam tentang Analisis Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi

Sulawesi Tengah dalam Pemberian Bantuan Khusus Murid Mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu.

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif dan Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2012 s/d November 2012 dan lokasi penelitian pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan dasar pertimbangan bahwa merupakan unit satuan kerja dalam jajaran Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengelola Pemberian Bantuan Khusus Murid Mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu, yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun yang menjadi Informan dalam dalam penelitian ini adalah : Kepala Bidang Pendidikan Menengah (DIKMEN), Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Staf, Bidang Pendidikan Menengah (DIKMEN) dan Kepala Sekolah SMA dan SMK.

Untuk memperoleh informasi dan data yang validasinya dapat dipertanggung jawabnya, maka dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan, diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu;

1. Data sekunder; adalah data bersumber dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan data sekunder lainnya berupa pedoman-pedoman kerja referensi-referensi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan
2. Data primer; adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya sebagai berikut:

- 1) Observasi. Teknik ini dilakukan melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Sugiono (2005:166), menjelaskan bahwa: “teknik pengumpulan data dengan

observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar”. dalam proses pengamatan dilakukan untuk melihat seluruh aktifitas pimpinan dan staf pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- 2) Wawancara. Adapun wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data pendukung lainnya sebagai bahan pelengkap dari kuisioner. pengumpulan data yang dibutuhkan dengan tanya jawab secara langsung kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Arikunto, (2006:231), adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya”. jadi, dokumentasi merupakan pencarian data mengenai sesuatu hal yang berupa catatan buku, surat kabar, agenda dan sebagaimana yang ada hubungannya dengan fokus penelitian pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam jurnal ini peneliti akan menganalisis data hasil penelitian di lapangan, data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara dengan tokoh-tokoh kunci baik para pejabat maupun staf pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, laporan serta buku-buku yang mendukung penelitian ini. semua data akan diolah dengan metode kualitatif deskriptif.

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input*

dengan *output*. Konsep produktivitas ini dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting, dari tingkat pemahaman aparat pelaksana terhadap uraian pekerjaan, jumlah permasalahan yang berhasil diselesaikan dan tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan.

Adapun jangka waktu penyelesaian berkas bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu yang masuk dapat diselesaikan selama waktu standar yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini tergantung pula pada jenis permasalahan yang dihadapi dalam pemeriksaan berkas pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu. Apabila permasalahan yang ditangani memerlukan telahan yang lebih mendalam maka memerlukan waktu yang lebih memakan waktu. Karena semakin cepat penyelesaian permasalahan yang ada maka dapat dikatakan semakin optimal tingkat kinerja pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu.

Kualitas layanan aparat pada pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu publik diukur melalui spontanitas dalam menangani permasalahan, tenggang waktu penyelesaian suatu permasalahan/pekerjaan dan tata krama dalam memberikan pelayanan. Kualitas layanan terdiri dari berbagai dimensi yang cukup kompleks, sehingga pemecahan masalah terhadap kualitas pelayanan publik tersebut membutuhkan sebuah proses dan cara-cara yang tidak mudah dan simpel, hal ini mengharuskan kita untuk melihat permasalahan yang muncul dengan berbagai

dimensi, dan bukan hanya dilihat dari satu dimensi semata .

Dalam konteks ini pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu yang merupakan media pelayanan dibidang administrasi. Dengan demikian pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu harus tetap melakukan langkah-langkah perbaikan di segala aspek kegiatannya, dalam rangka meningkatkan kinerja aparturnya, mengingat akan semakin dimungkinkan munculnya komplain dari siswa maupun dari pihak sekolah atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu.

Konsekwensi logis bagi pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu selaku organisasi pelayanan publik adalah menempatkan siswa dan sekolah SMA/SMK di Kota Palu sebagai faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas. Telah disinggung pada bagian kerangka teori, bahwa kontrol oleh publik sebagai siswa dan pihak sekolah SMA dan SMK di Kota Palu dapat digunakan sebagai cara untuk penilaian terhadap baik atau tidaknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi pelayanan publik tersebut.

Hal ini erat kaitannya dengan kepuasan siswa dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri terhadap kualitas pelayanan aparat pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu, persepsi Kepala Sekolah tersebut diambil dari hasil wawancara penulis, yang dimana Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

sebagaimana yang telah penulis tentukan berdasarkan data dan dokumen yang tersedia.

Responsivitas dalam konteks penelitian ini adalah kemampuan pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu untuk mengenali kebutuhan pihak sekolah, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi.

Secara singkat, responsivitas mengukur daya tanggap pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan. Hal ini sangat diperlukan karena merupakan bukti kemampuan aparat untuk mengenali kebutuhan siswa maupun sekolah, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan.

Persepsi tentang hal ini, merupakan aspek yang terkait dengan pengetahuan sekolah maupun siswa tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu dan apa manfaat serta keuntungannya bagi siswa penerima bantuan khusus murid mandiri maupun pihak sekolah yang mengajukan siswanya menerima bantuan tersebut.

Kenyataan ini dapat dilihat dengan serangkaian upaya yang dilakukan yaitu menampung dan mengevaluasi sejumlah permasalahan yang ditemui untuk dicarikan solusi pemecahannya oleh pimpinan dengan melibatkan para pegawainya. Hal ini menimbulkan *image* dari siswa yang ada di SMK dan SMA dan juga dari kalangan masyarakat bahwa aparat pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu, dapat

mengenali kebutuhan, khususnya sebagai unsur pelaksana yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.

Dari pengamatan penulis di lapangan juga didapat bahwa mekanisme pelayanan yang ada telah diupayakan agar dapat mengenali kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan aparat pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu cukup responsif terhadap keluhan-keluhan.

Suatu organisasi dikatakan melaksanakan kegiatan dengan tanggung jawab yang tinggi apabila dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar/sesuai dengan kebijaksanaan organisasi, oleh karenanya tanggung jawab bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Dalam hal ini tanggung jawab dari pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu akan dilihat dari proses kemudahan dalam hal pengajuan permohonan bantuan, kemudahan dalam pemeriksaan berkas permohonan bantuan, kecepatan dalam pendataan siswa yang dapat menerima bantuan khusus murid mandiri, dan ketepatan dalam penerbitan nama-nama siswa yang akan menerima bantuan khusus murid mandiri yang berada di SMK dan SMA di Kota Palu. Selanjutnya akan dibahas satu persatu tahapan – tahapan dalam kegiatan pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu untuk melihat tanggung jawabnya.

Kejadian yang dialami ini tentu bukan hanya terjadi sekali atau dua, melainkan kerap

kali dialami yang akan mengajukan pemeriksaan berkas setiap sekolah. Indikasi ini menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak puas dengan pelayanan yang memadai disamping itu pengangkatan staf pelaksanaan satkel PPLP SMA/SMK yang kurang profesional dalam menangani bidang kerjanya sehingga pelayanan pemberian bantuan tersebut sering tertunda. Dengan demikian dapat dikatakan tanggungjawab Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agak kurang maksimal.

Akuntabilitas organisasi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat *pelaksanaan misi yang kedua* yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial. Kewenangan dalam staf pelaksanaan satker PPLP SMA/SMK di Kota Palu pada Dinas Pendidikan Daerah Kota Palu, telah dilaksanakan dengan menerapkan berbagai kebijakan antara lain: kebijakan eksternal berupa Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah baik berupa kebijakan pusat maupun daerah (Propinsi), sedangkan kebijakan internal yaitu berupa kebijakan yang sasarannya melalui Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri antara lain: peraturan daerah dan Surat Keputusan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan kebijakan tentang pemberian bantuan khusus murid mandiri termasuk Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemberian Bantuan Khusus Murid Mandiri Pada SMA/SMK di Kota Palu.

Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas pada Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemberian Bantuan Khusus Murid Mandiri Pada SMA/SMK di Kota Palu daerah itu sendiri di dalam menetapkan satu cara melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Atas dasar itu semua di dalam pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

telah menetapkan enam kebijakan sebagai landasan di dalam menentukan arah tercapainya sasaran dan tujuan secara tepat dan kemudian kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana strategis yang secara global dapat mencerminkan semua aktivitas/kegiatan seperti yang diamanatkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : 01/SATKER PPMU/ST/2011 dan telah sesuai dengan cakupan bidang tugas yang menjadi garapan pada masing-masing bagian dalam organisasi, sehingga dengan penetapan kebijakan yang ada pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menetapkan sasaran.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto, 2002). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bagian DIKMENTI tidak terlepas dari tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Tanggung jawab yang ada dilakukan pada pihak yang memberikan wewenang, yaitu pihak atasan sesuai dengan jenjang organisasi.

Timbulnya tanggungjawab akibat dari adanya pemberian wewenang dari atasan kepada bawahan. Berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2008 Bagian DIKMENTI terdiri dari Seksi Pembinaan SMK dan Seksi

Pembinaan SMA. Ketiga Seksi Bidang tersebut telah diberikan uraian tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 Tahun 2008. Dengan adanya uraian tugas tersebut kewenangan telah diberikan secara legalitas. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Bidang memberikan tugas untuk dilaksanakan kepada masing-masing Kepala Seksi.

Tugas yang diberikan kepada Kepala Seksi tidak semuanya dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Acapkali tugas yang diberikan dibiarkan begitu saja, sehingga masalah yang perlu mendapat tindakan secepatnya menjadi lamban. Seperti adanya surat masalah tindakan lanjut hasil pemeriksaan yang berasal dari Badan Pengawas Kota udah hampir satu minggu, namun belum diolah oleh Kepala Seksi yang bersangkutan. Hal ini baru disadari oleh Kepala Bidang. Keadaan ini terjadi akibat dari kelalaian pihak Kepala Seksi yang bersangkutan, namun juga tidak terlepas dari tanggung jawab Kepala Bidang. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab Kepala Seksi dan Kepala Bidang terhadap pekerjaan yang ada.

Dari hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa pegawai penyaluran bantuan khusus murid mandiri pada Dinas pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak respon terhadap tugas yang diberikan kepadanya menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi dalam bidang tugasnya. Selanjutnya ada porsi tugas yang harus dilaksanakan oleh staf menurut pembagian tugas yang diberikan oleh kepala bidang. Dari sepuluh orang pegawai di DIKMENTI, enam di antaranya staf . Tiga orang dari staf tersebut bertugas sebagai operator komputer. Satu orang sebagai distributor surat, dua orang lagi bertugas sebagai staf administrasi dan registrasi surat. Para staf bekerja berdasarkan perintah dari para Kepala Bidang. Hasil pekerjaan para staf disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Bidang. Apabila telah

diperiksa dan disetujui dengan paraf Kepala Bidang , surat yang diolah sudah layak untuk dikirimkan. Bila ada kesalahan dalam isi, format dan prosedur pekerjaan Kepala Sub Bidang lebih banyak menyalahkan staf, dengan demikian Kepala Sub Bidang mengelak dari rasa tanggung jawab. Setelah dicermati tanggung jawab Pegawai penyaluran bantuan khusus murid mandiri pada Dnas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih rendah.

Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi Pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud yang terjadi diberbagai instansi Pemerintah. Menurut Theft Act 1968, salah satu jenis praktek fraud adalah korupsi (Jones, 1990). Praktek korupsi dalam pemerintah tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup dikawasan Asia Tenggara dan dunia. (www.transparency.org)

Berkenaan dengan pokok bahasan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemberian Bantuan Khusus Murid Mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu, diasumsikan bahwa faktor sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam penyaluran bantuan khusus murid mandiri. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hasil studi memperlihatkan bahwa kinerjanya belum terlalu maksimal dalam pemberian bantuan tersebut. Hal tersebut dapat di simpulkan dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, Produktivitas yang memperlihatkan tingkat pemahaman setiap pegawai dalam pemberian bantuan khusus murid mandiri pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik

akan tetapi pengurusan berkas yang selalu mengalami kesalahan dan pengunduran penyelesaian berkas atau tugas. *Kedua*, mengenai Kualitas Layanan yang memperlihatkan masih terdapat aparat atau pegawai pemberian bantuan khusus murid mandiri selalu menunda pekerjaan atau melakukan tugas pekerjaan lain. *Ketiga*, responsivitas memperlihatkan bahwa masih adanya keluhan dari setiap sekolah tentang penyaluran atau pembangian bantuan khusus murid mandiri siswa pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan belum optimalnya daya tangkap kebutuhan siswa maupun sekolah dan juga pembinaan terhadap kegiatan para tiap sekolah. *Keempat*, Resposibilitas. dalam hal ini melihat kemudahan dalam hal pengajuan dan pemeriksaan berkas yang di ajukan pihak sekolah yang akan menerima bantuan khusus murid mandiri yang dimana dalam responibilitas masih kurang maksimal dalam setiap pemeriksaan berkas yang di ajukan setiap sekolah, disetiap pengusulan nama-nama dari sekolah, pihak sekolah selalu merubah nama-nama penerima bantuan khusus murid mandiri, sehingga penyaluran terhambat. *Dan yang kelima*, akuntabilitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan dinas belum sesuai dengan aspirasi siswa dan pihak sekolah, tingkat kemampuan meningkatkan prakarsa dan kepedulian aparatur dan siswa dan sekolah baru sebatas pencapaian target belum sampai pada *outcome*, tingkat rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan belum dapat dilaksanakan.

Adapun dari hasil kesimpulan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemberian Bantuan Khusus Murid Mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu, ada beberapa faktor penghambat dalam Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemberian Bantuan Khusus Murid Mandiri pada SMA/SMK di Kota Palu

seperti Komunikasi dan dan Sumber daya manusia.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan di atas, maka disusunlah beberapa saran atau rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan Kinerja Pegawai Pemberian Bantuan Khusus Murid Mandiri di Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

1. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya kinerja pegawai pemberian bantuan khusus murid mandiri seharusnya mengevaluasi keluhan-keluhan serta saran dari siswa penerima bantuan atau dari pihak sekolah dan mencari titik lemahnya sehingga kinerja dan pelayanan yang dihasilkan kurang maksimal, serta mencari solusi untuk memperbaiki tingkat kinerja dan pelayanan yang maksimal dan juga seharusnya pihak sekolah maupun kepala sekolah se-Kota Palu, harus Pro aktif tentang pemberian dan penyaluran bantuan khusus murid mandiri pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dikarenakan ini sebagai program pemerintah Pusat maupun Daerah memajukan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dan juga dapat membantu siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
2. Meningkatkan peranan komunikasi, informasi dan memonitor secara langsung setiap pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan serta dapat memberikan petunjuk/saran kepada pegawai dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan khusus murid mandiri.
3. Seharusnya Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan sosialisasi kepada semua Kepala Sekolah, Wali Murid dan juga kepada siswa sekolah yang menerima bantuan khusus murid mandiri, sehingga pihak yang menerima bantuan khusus murid mandiri mengetahui persyaratan-persyaratan yang akan di

lengkapi dalam pengajuan bantuan khusus murid mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis senantiasa panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Kurnia-Nya, sehingga penyusunan jurnal ini dapat diselesaikan. Artikel ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Sains pada program Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako Palu. Berbagai hambatan yang penulis hadapi dalam penyelesaian jurnal ini, namun atas berkah dan rahmat-nya, disertai dengan kesungguhan hati penulis, hambatan-hambatan tersebut dapat di atasi.

Penulis menyadari bahwa penulisan artikel ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, olehnya itu penulis dengan kerendahan hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya menghanturkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hi. Sulaiman Mamar, M.A Pembimbing Utama yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, arahan dan saran yang tidak ternilai harganya untuk kesempurnaan penulis artikel ini. Demikian pula kepada Dr. Andi Pasanringi., M.Si., Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, petunjuk dan saran serta dorongan agar penulis berusaha menyelesaikan artikel ini.

Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita selesaikan, terutama bagi diri penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Perilaku Kinerja Organisasi Public*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fosipol UGM.
- Kumorotomo,W. 1996. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Moekijat. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Manajemen Kepegawaian)*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.